Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Keterbukaan DKI Menurun

Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menilai Pemprov DKI tidak siap dengan tata kelola penganggaran dan tidak cermat saat menyampaikan rancangan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS — Dua pekan terakhir, DPRD DKI Jakarta membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA-PPAS DKI tahun 2020. Sejumlah fraksi di DPRD menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak siap dengan tata kelola penganggaran dan tidak cermat saat menyampaikan rancangan anggaran. Seharusnya, rancangan KUA-PPAS 2020 bersifat final saat disampaikan ke DPRD. Namun, saat ini DPRD diberi rancangan anggaran mentah.

Idris Ahmad, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2019), mengatakan, rancangan penganggaran yang masih mentah terlihat saat rapat Badan Anggaran pada 23 Oktober 2019. Saat itu pihak eksekutif mengoreksi proyeksi APBD dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,44 triliun atau turun Rp 6,5 triliun. Alasannya karena ada koreksi terhadap proyeksi pendapatan.

Ternyata, dalam rapat-rapat komisi, pihak eksekutif belum menghitung anggaran belanja yang disesuaikan dengan revisi anggaran pendapatan itu. Artinya, pihak eksekutif belum membahas matang dampak pengurangan pendapatan terhadap anggaran belanja. "Dalam kata lain, DPRD disuruh bersih-bersih rancangan anggaran yang belum matang," katanya.

Fraksi PSI menyayangkan sikap pemprov yang tidak transparan. "Transparansi anggaran hal yang penting, bukan hanya kepada kami anggota Dewan sebagai wakil rakyat, tetapi kepada seluruh rakyat Jakarta pembayar pajak," ujar Idris.

Transparansi yang dimaksud adalah membuka semua data rincian komponen, mulai dari fase rencana kerja pemerintah daerah, rancangan KUA-PPAS, revisi KUA-PPAS selama masa pembahasan dengan DPRD, hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum ke APBD.

Anthony Winza Prabowo, anggota Komisi C DPRD DKI, menyoroti, transparansi sesuai sistem *e-budgeting* harus memasukkan detail komponen pembentuk pagu kegiatan. PSI juga meminta pemprov memasukkan hasil pembahasan ke dalam sistem *e-budgeting* sebelum rapat Badan Anggaran.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Saefulloh mengatakan, dirinya tidak sepakat jika rancangan anggaran DKI dinilai tidak transparan. Untuk pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta 2020, ia kecewa dengan pernyataan bahwa eksekutif selalu lambat menyerahkan draf KUA-PPAS.

"Draf KUA-PPAS itu sudah diserahkan rancangannya dari 5 Juli 2019 dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*. Lalu pada Oktober kami bersurat lagi agar anggaran dibahas," katanya sambil menjelaskan pergantian Dewan menjadi variabel kenapa pembahasan terlambat.

Mengenai peng-*input*-an hasil pembahasan, Saefulloh mengatakan itu belum saatnya. Waktunya adalah ketika rancangan KUA-PPAS disepakati sebagai KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif.

Sementara Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai keterbukaan informasi soal anggaran di DKI menurun. Padahal, keterlibatan publik dalam menyisir angka rencana anggaran bisa membantu pemprov mencegah terjadi korupsi.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mencegah angka anggaran janggal muncul lagi, Gubernur DKI Anies Baswedan merencanakan perbaikan sistem *e-budgeting* sehingga nanti mesin langsung mendeteksi angka anggaran janggal dalam KUA-PPAS. Namun, menurut Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan, langkah itu perlu diimbangi keterbukaan akses publik terhadap informasi itu.

Misbah menegaskan, dokumen perencanaan anggaran, termasuk KUA-PPAS, merupakan informasi publik, sama halnya dengan dokumen anggaran, seperti dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Fitra juga ikut menyisir lagi KUA-PPAS 2020. Hasilnya ditemukan lagi kejanggalan. Selain anggaran pengadaan lem Aica-Aibon, ada yang janggal pada anggaran untuk membiayai petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP), terutama pada Sudin PKP Jakarta Timur. Dengan menghitung angka rencana anggaran yang dimasukkan dibagi jumlah petugas yang ditargetkan menerima, anggaran per orang per bulan di Sudin Jakarta Pusat, Utara, Barat, dan Selatan rata-rata Rp 4,5 juta. Di Sudin Jakarta Timur, Rp 15,79 juta per orang per bulan.

Dewi Anggraeni, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), secara terpisah mengatakan, sebetulnya proses penyusunan anggaran di DKI sejauh ini sudah sesuai aturan. Namun, Dewi mendukung agar dibuka ruang partisipasi publik melalui keterbukaan informasi anggaran. (HLN/JOG)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Keterbukaan DKI Menurun

Temuan Anggaran DKI Jakarta 2020 yang Janggal Versi Fitra

- Pengeluaran
- Rencana Anggaran

Bolpoin
Rp 579,9 miliar
Untuk seluruh suku dinas.

Lem Aica-Aibon
Rp 126,225 miliar
Senilai Rp 126,204 miliar hanya untuk Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Timur, sisanya untuk OPD/SKPD lain.

Penghapus cair
Rp 24,2 miliar
Untuk Dinas Pendidikan.

Pembelian buku folio untuk Program Wajib Belajar 12 Tahun
Rp 78,8 miliar
1.063.287 buah di Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan.

Penyediaan jasa petugas penanganan penanggulangan kebakaran di Jakarta Timur
Rp 18,96 miliar
Senilai Rp 189,6 juta/orang/tahun atau Rp 15,8 juta/orang/bulan untuk target 100 orang. Wilayah lain rata-rata senilai Rp 4,5 juta/orang/bulan dengan target sekitar 300 orang.

Pembelian tenis meja untuk Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
Rp 8,9 miliar
1.401 buah di Dinas dan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta.

Pembelian gunting rumput/dahan untuk Program Pengelolaan Pertamanan
Rp 491 juta
Senilai Rp 223 juta atau 1.324 buah terdapat di Suku Dinas Kehutanan Kota Jakarta Utara.

Sumber: Analisis Anggaran DKI 2020 Seknas Fitra; Diolah Litbang *Kompas*/DEW

INFOGRAFIK: TIURMA